

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI MODERN TERHADAP TIMUR TENGAH SEBELUM AKP BERKUASA

Di bab II penulis akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Turki semenjak Turki resmi menjadi negara republik yang sekuler di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923. Posisi geografis Turki yang berada di antara benua Asia dan Eropa menjadikan Turki sebagai jembatan dua budaya, Barat dan Timur. Namun saat itu Turki bukannya menjadi agen perdamaian, tetapi malah selalu berkonflik dengan negara-negara di Timur Tengah. Di bab ini penulis akan mengelaborasi lebih jauh tentang hubungan Turki dengan Palestina, Mesir, Syria, Libanon, dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang semakin memburuk karena perbedaan pandangan.

A. Konflik Perbatasan dengan Syria dan Irak di Era Kemalis

Kemudian penulis akan mengelaborasi tentang kebijakan luar negeri Turki yang berhubungan dengan Timur Tengah. Pada tahun 1923-1926 kebijakan luar negeri Turki masih berkisar dalam isu perbatasan negara. Meskipun secara langsung Turki berkonflik dengan Inggris dan Perancis dalam masalah perebutan daerah Mosul dan Hatay, namun dampak dari masalah perbatasan tidak berhenti setelah Inggris menandatangani perjanjian untuk bersikap netral terhadap permasalahan Turki. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan penjelasan yang gamblang dari berbagai jurnal yang bisa dipercaya.

Kebijakan luar negeri Turki di antara dua perang dunia dipengaruhi oleh visi serta karakter Attaturk. Kebanyakan penulis menyebutnya sebagai "Era

luar negeri Turki adalah untuk mencari pengakuan sebagai sebuah entitas yang berdaulat, dan untuk menikmati keuntungan penuh dari perdamaian. Selama periode ini, kebijakan luar negeri Turki tetap mengarah pada norma-norma yang tidak berubah dari ideologi Kemalis, selain Konvensi Montreux dan isu Hatay.¹²

Ketika kita meneliti kebijakan luar negeri Turki pada periode 1923-1929, pertama-tama kita harus melihat pada Perjanjian Lausanne tahun 1923. Perjanjian ini merupakan bantu loncatan bagi kebijakan luar negeri Turki dan Turki merasa puas atas penyelesaiannya. Setelah itu, Turki mengejar pendirian yang konservatif daripada menjadi revisionis. Bagaimanapun juga, tersisa beberapa masalah di Lausanne seperti Mosul, Hatay, semenanjung-semenanjung, dan isu-isu pertukaran populasi.

Untuk memulai, pertanyaan tentang Mosul menempati perhatian besar dari pembuat kebijakan luar negeri Turki antara tahun 1923-1926. Mosul adalah masalah, karena hal itu berarti ada pelepasan diri dari Pakta Nasional Turki. Sebenarnya, desakan terhadap provinsi Mosul dikarenakan oleh adanya sumber-sumber minyak. Kedua belah pihak, baik Turki dan Inggris tidak ingin menyerah terhadap keberatan mereka atas Mosul. Inggris menghembuskan isu kepada Liga Bangsa-Bangsa bahwa Turki bukanlah anggota dari mereka. Tentu saja solusi Liga Bangsa-Bangsa untuk permasalahan tersebut adalah bahwa Mosul harus menjadi bagian dari Iraq, karena Inggris menempati posisi dominan dalam Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1926, Inggris dan Turki menyelesaikan perjanjian bilateral yang mana menyatakan bahwa Turki menyerah soal kebijakan

¹² Ayla Gol. A Short Summary of Turkish Foreign Policy: 1923-1939. (Ankara: Univesitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, 1993). Hal. 57

terhadap Mosul. Ada dua alasan yang menyebabkan keputusan ini: yang pertama adalah adanya pemberontakan Shaikh Said di bagian timur Turki. Sedangkan alasan ke dua adalah tidak inginnya Attaturk untuk mengobarkan perang melawan Inggris. Karena Turki telah menjalani perang selama 11 tahun dan negara mereka telah mencapai puncak kelelahan akan perang-perang tersebut.¹³

Politik luar negeri Republik Turki sepanjang periode 1923-1945 bisa dikatakan hati-hati, realistik, dan pada umumnya bertujuan mempertahankan status quo dan kemenangan yang diraih dengan susah payah di tahun 1923. Sampai akhir tahun 1920-an, hubungannya dengan negara-negara demokrasi Eropa Barat terhambat sebagai akibat dari perjanjian Lausanne, di mana sejumlah masalah tidak terselesaikan. Yang terpenting adalah perselisihan dengan Inggris mengenai Mosul, sebuah provinsi kaya minyak, yang sebagian besar dihuni oleh rakyat Kurdi, sekalipun bercampur dengan kaum minoritas Arab dan Turki. Mosul diduduki oleh tentara Inggris setelah gencatan senjata tahun 1918, sehingga Turki memasukkannya ke dalam daerah-daerah yang kemerdekaannya mereka klaim dalam "Pakta Nasional". Dalam perundingan selama 1923 dan 1924, Inggris menegaskan bahwa Mosul termasuk wilayah Irak, dan menolak usulan Turki untuk melakukan plebisit. Ketika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, masalah itu diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, yang di masa itu Turki belum menjadi anggotanya. Liga Bangsa-Bangsa memulai pembicaraan tentang ini di bulan September 1924. Pada waktu yang sama, di bagian utara

¹³ [https://avrupanaliz.wordpress.com/2010/05/28/turkish-foreign-policy-between-1923-1939/\(02/10/2014, pukul 14:35 WIB\)](https://avrupanaliz.wordpress.com/2010/05/28/turkish-foreign-policy-between-1923-1939/(02/10/2014, pukul 14:35 WIB))

Mosul terjadi pertempuran kecil antara pasukan Turki dan Inggris dan pada tanggal 9 Oktober pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah ultimatum di mana ia menuntut penarikan mundur pasukan Turki. Pasukan Turki mundur dan dibuatlah tapal batas sementara. Setahun kemudian, bulan September 1925, sebuah komisi Liga Bangsa-Bangsa menyelidiki situasi langsung di tempat itu dan menyatakan bahwa Mosul termasuk wilayah Irak. Keputusan mengenai perkara ini diambil oleh Liga Bangsa-Bangsa di bulan Desember 1925 dan di bulan Juni 1926 Turki menyetujui keputusan itu secara resmi. Sebagai balasannya, Turki memperoleh 10% dari penghasilan minyak provinsi itu selama 25 tahun berikutnya. Klaim ini kemudian dihapuskan dan diganti dengan pembayaran uang sebanyak 700.000 poundsterling oleh Inggris.¹⁴

Dari sumber lain, "The Turkish Question" untuk Inggris Raya berpusat di sekitar pertanyaan tentang Mosul. Menurut Turki, Mosul berada di dalam batas-batas Pakta Nasional. Di sisi lain, Perjanjian Lausanne meninggalkan perbatasan yang tidak ditentukan dengan Iraq untuk diselesaikan secara langsung dengan Inggris Raya sebagai wakil dari Iraq. Sesuai dengan artikel ke 3 dari Perjanjian Lausanne, masalah tersebut diselesaikan dengan negosiasi yang saling menguntungkan dalam sembilan bulan. Pembicaraan mulai dibuka di Istanbul pada 9 Mei 1924, namun tidak mencapai konklusi yang pasti. Perjanjian Lausanne kemudian dipertimbangkan bahwa jika partai-partai gagal menemukan solusi dalam 9 bulan, maka masalah tersebut akan diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa.

¹⁴ Erick J. Zurcher. Op. Cit. Hal. 261.

Mulai 6 Agustus 1924 Inggris Raya telah memutuskan untuk membuat aplikasi unilateral kepada Liga Bangsa-bangsa dan mengusulkan "Perbatasan Iraq" sebagai agenda Dewan Liga Bangsa-bangsa. Turki mengusulkan untuk mengadakan referendum di daerah tersebut. Selama diskusi yang dimulai tanggal 24 September, Inggris Raya menolak permintaan plebisit Turki dengan beralasan bahwa permasalahannya adalah pembagian wilayah. Akhirnya pada 30 September 1924, Dewan Liga Bangsa-bangsa memutuskan bahwa komisi anggota-anggota netral akan diatur untuk menyelidiki hal tersebut. Pada saat yang sama, Inggris Raya menerbitkan 48 jam ultimatum kepada Turki untuk pergi dari area tersebut pada 9 Oktober 1924. Turki memohon kepada Liga Bangsa-bangsa untuk menentang ultimatum tersebut. Liga Bangsa-bangsa memanggil Turki untuk mengadakan pertemuan khusus membicarakan masalah ini di Brussel. Mereka memutuskan untuk membagi wilayah tersebut menjadi 2. Hal ini kemudian dikenal dengan sebutan "garis Brussel". Perbatasan sementara ini mendekati wilayah-wilayah provinsi Ottoman dari Mosul dan Hakkari. Dua hari kemudian, Komisi Penyelidikan memberikan laporan kepada Liga Bangsa-bangsa pada 16 Juli 1925. Garis Brussel telah diterima sebagai batas geografis. Turki menolak untuk mengakui keputusan dan pertanyaan dari temuan Komisi. Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-bangsa mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Turki pada 2 November 1925. Hal ini menjelaskan bahwa Komisi dari Dewan Liga Bangsa-bangsa mempunyai tugas khusus untuk menyelidiki pertanyaan dari perbatasan antara Turki dan Iraq. Masalahnya kemudian merujuk kepada Sidang Permanen Pengadilan Internasional di Hague untuk pelaporan opini. Sidang Permanen Pengadilan Internasional hanya menanyakan opini mereka untuk

permasalahannya adalah masalah politik yang tidak dapat diputuskan oleh tujuan-tujuan yudisial, dan untuk alasan tersebut, Turki tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas di dalam pengadilan. Bagaimanapun juga Dewan LBB telah memutuskan bahwa "Garis Brussel" akan menjadi batas permanen. Maka dari itu, LBB menghadiahkan Mosul kepada Iraq pada 16 Desember 1925. Tanpa menghiraukan reaksi pegawai dan masyarakat, pemerintah Turki memutuskan untuk menerima keputusan ini.

Ada dua alasan untuk menerima keputusan ini: Yang pertama, pemerintah Turki merumuskan masalah tersebut sebagai isu teritorial dan bukan sebagai isu ekonomi. Mosul yang sebelumnya adalah provinsi di era Ottoman adalah wilayah yang kaya minyak namun populasinya sebagian besar adalah orang Kurdi. Menurut Ankara, integrasi Kurdi di dalam negara Turki akan menimbulkan semakin banyak masalah.

Curzon telah bersikeras bahwa Mosul adalah bagian dari Iraq secara sejarah, ekonomi, dan latar belakang ras. Juga apabila Turki memiliki Mosul, wilayah Turki akan menjadi 60 mil dari ibukota Iraq. Alasan lain untuk mencari penyelesaian secara cepat dalam permasalahan Mosul adalah pemberontakan orang Kurdi. Sebuah revolusi dari orang-orang Kurdi yang dipimpin oleh Syaikh Said telah terjadi di daerah Dersim pada February 1925.

Simbol yang paling penting dari persaudaraan orang Turki dan Kurdi telah hilang dengan adanya abolisi kekhalifahan. Syaikh Said dan Syaikh lainnya

pemerintahan tanpa Tuhan. Dengan mengatasnamakan restorasi Hukum Suci, kekuatan Syaikh bergerak melalui pedalaman dan mencapai kantor negara.

Karena alasan-alasan inilah Turki menerima keputusan dari Liga Bangsa-bangsa dan Turki merumuskan tiga proposal untuk deserahkan kepada Inggris Raya:

- 1.) Inggris akan menandatangani perjanjian netralitas dengan Turki.
- 2.) Kedaulatan Mosul akan diisalurkan kepada Iraq sebagai sebuah negara yang secara penuh diperintah sendiri.

- 3.) Sebuah permintaan untuk membagi minyak di Mosul.

Perjanjian Inggris-Turki ini telah ditandatangani pada 6 Juni 1926. Sebuah klausa penting adalah bahwa perjanjian tersebut mengizinkan Turki untuk mendapatkan 10% dari seluruh royalti minyak selama 25 tahun dari ladang minyak Mosul. Namun bagaimanapun juga, dalam setahun Turki telah menerima pembayaran langsung sebesar 500.000 Lira Turki. Lebih dari itu, Inggris juga menjanjikan untuk menahan diri dari agitasi mewakili orang-orang Kurdi dan Armenia.¹⁵

Satu masalah yang menjadi sumber perselisihan antara Turki dan Perancis tahun 1930-an adalah soal Sancak (distrik) Alexandria, daerah yang dikenal oleh kaum nasionalis Turki sebagai "Hatay" (Negeri bangsa Hattia, yang akan diingat—dipandang sebagai bangsa proto-Turki di masa itu) dengan kota

Antakya. Dalam perjanjian Perancis-Turki tahun 1921 dan dalam

perjanjian di Lausanne, daerah ini berada di luar tapal batas negara Turki baru, namun otonomi kultural diberikan kepada komunitasnya yang merupakan warga Turki yang memiliki jalinan kuat dengan Turki dan mengikuti perkembangan-perkembangannya di Turki. Dibentuklah Hatay Halk Firkasi (Partai Rakyat Hatay) dan bahkan hal-hal seperti “reformasi topi” dan “reformasi alfabet” diberlakukan di sana.

Dalam bulan September 1936 Perancis mengumumkan bahwa ia akan memberikan kemerdekaan kepada Syria dan bahwa ia berniat untuk memasukkan Hatay ke dalam negara Syria baru itu. Ini tidak diterima oleh rakyat Turki. Masalah ini kemudian dibawa ke Liga Bangsa-bangsa, yang mengirimkan sebuah misi ke daerah itu pada bulan Januari tahun 1937. Misi ini berkesimpulan bahwa warga Turki yang ada di Alexandria merupakan kaum Mayoritas. Inggris, karena ingin mencegah pertikaian antara Perancis dan Turki di hadapan ancaman dari Italia, kini menjadi juru penengah dan dicapailah sebuah kesepakatan dimana Hatay menjadi sebuah “entitas independen”, yang urusan-urusan eksternalnya diwakili oleh Syria. Sebuah konstitusi untuk distrik Alexandria disusun oleh sebuah komite ahli hukum internasional dan pemilihan umum diadakan di bulan April 1938. Semasa pemilihan umum terjadi huru hara berdarah di seluruh Hatay yang mengakibatkan dibatalkannya pemilihan umum itu. Kini situasi internasional sedemikian mengancam sehingga Perancis siap bergabung dengan Turki untuk menghadapi Nazi Jerman dan Italia dengan segala resikonya. Di bulan Juli, pemilihan umum baru diadakan di bawah militer Perancis—Turki, dan menghasilkan 22 kursi untuk Turki dari 40 kursi yang disediakan di Parlemen. Dalam sidangnya yang pertama parlemen baru memproklamkan

Republik Hatay Merdeka. Hampir setahun kemudian, tanggal 29 Juni 1939, parlemen mengumumkan penyatuan negara ini dengan Turki—hal yang membuat berang Syria, yang bahkan sampai sekarang ini pun tetap mencantumkan daerah itu sebagai milik Syria di peta mereka.¹⁶

B. Permasalahan Aliansi Regional dan Ideologi di Era Partai Demokrat

Keanggotaan Turki dalam blok Barat di masa Perang Dingin secara umum menentukan posisinya di kedua wilayah di mana Turki merupakan bagian darinya, Balkan dan Timur Tengah. Turki merupakan unsur yang penting sekali dalam rencana Dulles, Menteri Luar Negeri AS, untuk melingkari blok Uni Sovyet dengan aliansi-aliansi regional menurut pola NATO.

Di Timur Tengah, upaya Amerika yang pertama untuk membentuk sebuah aliansi regional itu adalah dengan cara menyatukan Turki dan Mesir tahun 1951-1952, namun Turki dan Mesir sama-sama kurang antusias untuk melakukan penggabungan ini. Hubungan antara Turki dengan negara-negara Arab terhambat oleh sikap Turki dalam konflik Israel-Palestina. Sebelumnya, Turki mendukung negara-negara Arab, sebab kepemimpinan di Ankara mengharapkan negara Yahudi itu pro-Sovyet. Dengan menghangatnya hubungan Amerika-Israel dari tahun 1949, Turki pun mengubah posisinya. Ia duduk bersama Perancis dan Amerika Serikat dalam “Komisi Konsultasi Palestina” di tahun 1949 dan mengakui Isrel secara dipolomatis.

Setelah gagalnya aliansi Turki-Mesir, upaya kedua untuk membentuk satu blok regional itu adalah diadakannya perjanjian kerjasama dengan Pakistan, yang ditandatangani pada bulan Agustus 1954. Pada bulan February 1955, perjanjian ini disusul dengan perjanjian kerjasama dan saling membantu dengan satu-satunya sahabat Turki di dunia Arab, yakni Kerajaan Irak di bawah orang kuatnya yang bernama Nuri al-Said. Inggris, Iran, dan Pakistan juga menandatangani "Pakta Baghdad" ini, sedangkan Amerika Serikat berstatus pengamat.

Tahun-tahun setelah 1955 menunjukkan adanya gelombang pasang nasionalisme Arab di seluruh Timur Tengah, yang dipimpin atau setidaknya diilhami oleh presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser. Ketika Amerika memblokir upaya-upaya Nasser dalam menghimpun uang bagi pembangunan Bendungan Aswan, dia menasionalisasi Terusan Suez di tahun 1956. Ini menciptakan serangan dari Israel, Perancis dan Inggris. Sekalipun secara militer mereka menang, namun negara-negara yang melakukan serangan ini dipaksa mundur oleh Amerika Serikat yang memandang tindakan mereka sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, kolonialisme bentuk lama, yang akan membahayakan kepentingan-kepentingan Barat di wilayah itu. Hasilnya adalah bahwa Nasser, sekalipun secara militer kalah, keluar dari konflik itu dengan prestise besar di mata dunia Arab dan bahwa sikapnya yang mempertahankan nasionalisme sosialis Arab menjadi populer di seluruh Timur Tengah. Pemerintah Partai Demokrat di Turki sangat membenci Nasser dan menganggapnya sebagai agen komunis. Pada masa krisis, Terusan Suez, Turki merasa harus mendukung Mesir secara lisan,

agak tidak tegas dan perjanjian Turki-Baghdad masih terus dianggap sebagai boneka imperialisme Barat di dunia Arab. Di tahun 1957, ketegangan antara Turki dan Syria sedemikian memuncak sehingga tentara Turki mengancam akan melintasi batas dan pasukan Mesir mendarat di Syria. Pada tahun yang sama pasukan Inggris harus campur tangan di Yordania untuk menumpas pemberontakan Nasseriah dan mempertahankan kekuasaan Raja Hussein. Pada tahun 1958 Syria dan Mesir, atas permohonan pemimpin Syria, membentuk Republik Perstuan Arab yang usianya tidak lama. Perang saudara antar umat Kristen konservatif dan Nasseriah meletus di Libanon dan, atas permintaan Presiden Kristiani Libanon Shamun, marinir Amerika mendarat di Libanon dengan menggunakan pangkalan-pangkalan di Turki. Dari sudut pandangan pemerintah Turki, berita terburuk tahun 1958 adalah kudeta kaum Nasionalis di Baghdad yang mengakibatkan meninggalnya Raja dan Perdana Menteri Nuri al-Said. Menderes mengambil keputusan untuk campur tangan secara militer di Irak dan pasuka Turki dikerahkan ke perbatasan. Hanya desakan kuat Amerika Serikat dan janji pinjaman uang yang lebih banyaklah yang mampu mencegah invasi Turki.

Di tahun 1960, Pakta Baghdad, atau yang tersisa dari perjanjian itu, setelah rezim baru di Irak digulingkan, diubah menjadi Central Treaty Organization (CENTO), di mana Amerika Serikat merupakan anggota penuh. Namun seperti halnya perjanjian sebelumnya, hanya sedikit yang dilakukan oleh CENTO. Tidak seperti negara-negara NATO, anggota CENTO tidak memiliki sikap saling mempercayai dalam melakukan pertukaran rahasia militer dan sandi rahasia dan

supranasional, dan tanpa integrasi itu, efektivitas militer organisasi itu akan tetap minimal.¹⁷

Dari sumber lain juga menyebutkan, Turki mengakui negara Israel sesaat setelah berdirinya di tahun 1949 dan menjadi negara Muslim pertama yang mengakui Israel. Langkah politik ini tidak disambut baik oleh negara-negara di Timur Tengah dan hubungan mereka menjadi dingin untuk beberapa waktu di sekitar wilayah tersebut. Kunci dari kepentingan posisi geografis dan militer ini membawa Turki untuk menjadi anggota NATO pada 18 February 1952. Sebagai jaminan dari keanggotaan ini, Turki ikut mengirim pasukan ke Perang Korea bersama Amerika.¹⁸

C. Hubungan Mesra Turki dengan Amerika dan Israel di Era Republik Kedua

Politik Luar Negeri semua pemerintahan selama republik kedua di Turki berkaitan sangat erat dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan setelah Perang Dunia Kedua. Hubungan erat dengan Amerika Serikat dan orientasi ke negara-negara demokrasi Barat tetap merupakan landasan pokok. Kebijakan luar negeri pemerintahan-pemerintahan berikutnya bertujuan untuk meningkatkan nilai strategis Turki di mata aliansi Barat, supaya mereka tetap mau melindungi Turki dan supaya Turki dapat memperoleh bantuan militer serta ekonomi dari mereka. Namun, kontinuitas hubungan penting itu terhambat dengan adanya krisis misil, produksi opium, masalah Siprus, soal hak-hak azasi manusia, dan masalah Armenia. Lagipula, selama periode ini kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh

¹⁷Ibid. hal. 308-310.

¹⁸K. Keyman and Tuba Kanci. CIDOB International Yearbook, Country Profile: Turkey. (Barcelona:

para ahli strategi politik luar negeri di Ankara semakin tidak selaras dengan opini publik.

Hubungan dengan negara-negara Islam, khususnya Arab, selalu problematis karena adanya jalinan hubungan Turki dengan Israel. Perang 6 hari tahun 1967 menimbulkan bangkitnya dukungan bagi rakyat Palestina di kalangan rakyat Turki sayap kiri, namun kebijakan pemerintah tetap sbagaimana sebelumnya. Krisis minyak tahun 1973-1974, yang menimbulkan kesulitan bagi ekonomi Turki dan menciptakan kekayaan bagi negara-negara Teluk, mendesak pemerintah Turki untuk memikirkan kemungkinan kerja sama dengan Arab. Hal ini juga diinginkan oleh para menteri kabinet Partai Keselamatan Nasional Erbakan karena alasan-alasan ideologis, namun kebijakan itu membuahkan hasil sangat sedikit. Perindustrian Turki tidak berorientasi ekspor dan tradisi perdagangan dengan jazirah Arab sedikit, sehingga rencana-rencana bagi usaha joint venture (keterampilan teknis Turki dan Arab) hampir tidak membuahkan apa-apa. Perkembangan yang riil di bidang ini terjadi hanya setelah kejutan harga minyak kedua pada tahun 1979-1980.¹⁹

Diplomasi Turki mempunyai masa-masa keintiman yang lebih terhadap negara-negara tetangga Arab, termasuk masa-masa selanjutnya di mana terjadi krisis minyak pada tahun 1970-an. Masa-masa ini dianggap sebagai pendekatan kembali, namun belum bisa diartikan sebagai kerjasama yang lebih dekat pada masalah-masalah kepentingan Ankara. Contoh besarnya dapat dilihat pada masalah Cyprus. Pada tahun 1964, dan lagi mengikuti intervensi Turki di tahun

¹⁹Erick J. Zurcher. Op.cit. hal. 368-369

1974, opini Arab serempak negatif, meskipun Turki juga berperan sebagaipelindung dari saudara-saudara muslim di Cyprus. Pada tahun 1960-an, support Arab untuk Yunani sebenarnya termasuk suplay pasukan ke milisi Yunani Cypriot. Di tahun-tahun sejak 1974, tidak ada satu negara Arab atau satu negara Muslim pun yang mengakui “Republik Turki di Siprus Utara” dan negara-negara di seluruh Timur Tengah telah konsisten mendukung resolusi PBB dalam pemanggilan untuk menarik mundur pasukan Turki dari Utara Cyprus.²⁰

D. Dukungan Turki terhadap Invasi dan Konflik di Negara-negara Timur Tengah di Era Republik Ketiga

Situasi di Timur Tengah pada tahun 1980-1988 pertama didominasi oleh revolusi Iran dan kemudian oleh Perang Iran-Irak. Pemerintah militer Turki 1980-1983 memandang Republik Islam Iran dengan rasa curiga, takut terhadap pengaruhnya pada kelompok-kelompok Islam di Turki. Serangan-serangan Iran terhadap Attaturk dan kebijakan-kebijakannya semakin memperbesar kecurigaan itu dan rakyat Turki merasa tersinggung ketika para utusan Iran yang berkunjung ke Turki menolak untuk meletakkan karangan bunga pada pusara Attaturk. Namun Turki tetap memelihara politik netralitasnya yang dipantau amat cermat selama perang yang meletus ketika Irak menyerbu Iran Selatan tahun 1982. Iran, yang menderita embargo perdagangan Amerika, menjadi pasar ekspor Turki yang terpenting pada tahun 1983-1984, namun di waktu yang sama Turki mengizinkan Irak untuk memompa minyak melalui saluran pipa ganda di wilayahnya ke terminal di Mediterania.

Di akhir tahun 1980, hubungan-hubungan Turki dengan Iran secara bertahap membaik sedangkan hubungan dengan Irak dan Syria memburuk. Alasannya adalah adanya konflik mengenai pemanfaatan sumber daya air sungai Euphrat dan Tigris, yang menjadi semakin akut ketika GAP (Proyek Anatolia Tenggara), dan waduk barunya yang sangat besar di Euphrat sudah mendekati penyelesaian. Sebagai sebuah negara hilir yang memerlukan air untuk proyek-proyek pertaniannya sendiri, Syria berada dalam posisi terjepit. Ia berusaha untuk memerdekakan Turki dengan cara menyokong perang gerilya PKK, yang diijinkan beroperasi dari wilayahnya, tawar menawar yang tersirat adalah bahwa Syria akan berhenti mendukung PKK jika jaminan suplay air untuk Syria dikabulkan. Sejauh yang bisa dipastikan, Turki belum mengabulkan keinginan ini.

21

Di tahun ini, hubungan Turki dengan Amerika Serikat pun menjadi semakin dekat. Amerika menjadikan kekuatan militer Turki sebagai basis dalam pengeboman Irak di tahun 1991. Amerika Serikat dipandang sebagai sekutu yang strategis dan Turki sebelumnya telah terafiliasi dengan kebijakan containment Iran dan Irak. Ketakutan akan tersebarnya Islam yang radikal dari Iran dan proyek untuk memastikan bahwa PKK tidak mempunyai kemungkinan untuk mendirikan negara Kurdi yang independen di wilayah tenggara membuat Turki bekerja sama dengan Amerika. Selain itu, Turki dan Amerika sebagai anggota yang sama dalam NATO memainkan peran kunci dalam penjagaan perdamaian di Somalia, Bosnia, Kosovo dan Afghanistan ketika fungsi dari NATO sendiri telah berubah selama periode ini setelah adanya pembubaran blok Komunis.

²⁴Erick J. Zurcher. Op.cit hal 422-423

Hubungan Turki dengan negara-negara Timur Tengah juga mulai melemah karena pengakuan Turki atas negara Israel, namun dalam proses perdamaian Arab-Israel, Turki mencoba untuk memainkan peran penengah. Memikirkan betapa pentingnya saluran-saluran energi untuk Eropa, Turki mulai meletakkan pondasi pentransferan energi dari Kaukasus dan daerah Teluk.²²

Ketika Irak menduduki Kuwait pada bulan Agustus 1990, Turki menjadi salah satu pendukung paling aktif dan antusias terhadap koalisi PBB pimpinan Amerika yang pertama-tama menerapkan sanksi kepada Irak dan kemudian, di bulan Januari 1991, melakukan serangan kenegara tersebut. Dukungan bersemangat terhadap koalisi itu (yang mencakup penghentian semua lalu lintas ke Irak dan memutuskan saluran minyak melalui saluran pipa di wilayah Turki) merupakan kebijakan pribadi Presiden Ozal (yang diberi kekuasaan darurat pada tanggal 17 Januari 1991 untuk menangani krisis itu). Dia menyadari bahwa, Turki telah kehilangan sebagian terbesar signifikansi strategisnya sebagai benteng pertahanan untuk menghadang Uni Sovyet, yang merupakan alat Turki terpenting dalam memperoleh keanggotaan dalam ME dan dalam mencari dukungan Barat. Ozal memandang partisipasi Turki dalam koalisi itu sebagai satu jala untuk mempertegas status Turki sebagai benteng Eropa di timur Tengah, dan bahkan barangkali untuk mempercepat masuknya Turki ke dalam Masyarakat Eropa, sebagaimana jalan yang telah ditempuh Menderes ketika Turki hendak menjadi anggota NATO dengan cara mengirim pasukannya ke Korea. Kebijakan ini tidak mendapat dukungan dari partai-partai oposisi atau dari opini publik Turki. Oposisi terhadap sikap Ozal yang sangat pro Amerika itu memuncak ketika

dia memberikan hak kepada tentara Amerika untuk menggunakan instalasi militer utama mereka di Turki, pangkalan udara Inccirlik di sebelah timur Adana, untuk melancarkan serangan bom ke Irak. Hal ini mengakibatkan Turki menjadi front terdepan dan menjadi target potensial bagi serangan angkatan udara Irak. Meskipun demikian, sekutu NATO Turki hampir tidak bergerak sama sekali untuk membantu perlindungannya. Belgia, Jerman, dan Italia mengirimkannya sejumlah pesawat tempur yang sudah usang dengan persenjataan kurang lengkap yang telah ditandai untuk tidak dipakai lagi. Hanya Belanda yang mengirimkan unit-unit rudal Patriot darat- ke udara yang modern.

Dalam peristiwa itu Turki bisa menghindari serangan-serangan Irak. Masalah riilnya bermula ketika perang itu usai. Semasa perang, Presiden Amerika, Bush, mendesak para tokoh Kurdi di Irak untuk memberontak melawan rezim Saddam Hussein di Baghdad. Ketika pasukan sekutu menghantam tentara Irak di selatan, warga Kurdi bertindak sebagaimana diminta oleh Barzani serta Talabani bersma-sama melancarkan perlawanan di utara. Dengan desakan dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah (termasuk Turki), yang tidak ingin melihat Irak terpecah-belah dan berdirinya negara Kurdi, Amerika menghentikan serangannya, membiarkan rezim Saddam Hussein tetap bertahan. Ini memungkinkan Saddam untuk menumpas pemberontak Kurdi dengan pasukannya yang masih tersisa.

Akibatnya adalah bahwa sejumlah besar warga Kurdi kabur melintasi batas dan memasuki Iran serta berusaha untuk melarikan diri melalui tapal batas utara untuk memasuki Turki. Turki tidak menginginkannya. Masalah serius yang

dia diyakinkan bahwa jika ia mengizinkan masuknya setengah juta pengungsi Kurdi, dunia akan membiarkan dan melupakan sama sekali soal itu. Turki memiliki pengalaman yang menunjukkan bahwa ini mungkin saja terjadi: 36.000 pengungsi Kurdi yang kabur dari Irak ketika Saddam Hussein membombardir mereka dengan gas sberacun tahun 1988 masih berada di camp-camp dekat Diyarbakir. Jadi tentara Turki diperintahkan untuk menghentikan warga Kurdi beberapa kilometer dari tappal batas Turki, sesuatu yang membangkitkan banyak kecaman terhadap Turki di Barat.

Sebagai ganti membuka tapal batas itu, presiden Turki meluncurkan rencana (yang dengan cepat diterima oleh perdana menteri Inggris, John Major) untuk mendirikan zona keamanan di Irak Utara, di mana wrga Kurdi akan dilindungi dan angkatan udara Irak tidak akan diizinkan terbang operasi-operasi pertolongan bagi kaum pengungsi Kurdi diorganisir oleh PBB dan di bulan Juni 1991, turki menyetujui pembentukan pasukan intervensi (pada mulanya bernama Poised Hammer kemudian Provide Comfort II), yang terdiri dari pasukan Amerika, Inggris dan Perancis, untuk mencegah upaya Irak menyerang warga Kurdi di zona keamanan tersebut. Unit-unit angkatan udara (pasukan gabungan itu) menggunakan pangkalan di Incirlik dan Batman, sedangkan angkatan darat ditempatkan di Silopi. Setelah tanggal 30 September pasukan tersebut hanya terdiri dari unit-unit angkatan udara.

Perang Teluk banyak merugikan Turki (hilangnya pendapatan sebesar \$6 milyar) dan, sekalipun kerugian ini sebagian diganti melalui sumbangan dari Jerman dan Jepang, keuntungan politik yang telah dibayangkan oleh Presiden

Turki relatif tetap terisolasi di Timur Tengah. Hubungan dengan Dunia Arab masih tetap dingin karena Turki semakin menjalin hubungan erat dengan Israel, termasuk kerjasama militer. Ketika Erbakan berkuasa, hubungan luar negeri merupakan suatu bidang di mana perdana menteri dari kubu Islam itu, yang harus memberi konsesi luas bagi militer dan bagi rekan-rekan koalisinya di dalam negeri, dapat menunjukkan lewat WP (Welfare Party/Partai Kesejahteraan milik Erbakan) dalam pemerintahan betul-betul menjadi pertentangan. Oleh karena itu, kunjungan pertamanya ke luar negeri adalah negeri-negeri Muslim, termasuk—dan ini tidak menyenangkan Amerika—Iran dan Libya. Erbakan tidak, dan hampir pasti tidak dapat, mengurangi ikatannya dengan NATO dan EU. Bahakn oleh angkatan bersenjata dia didesak untuk menandatangani perjanjian kerjasama militer dengan Israel oleh angkatan bersenjata.²³

²³Erick J. Zurcher. Op. Cit. Hal. 424-427